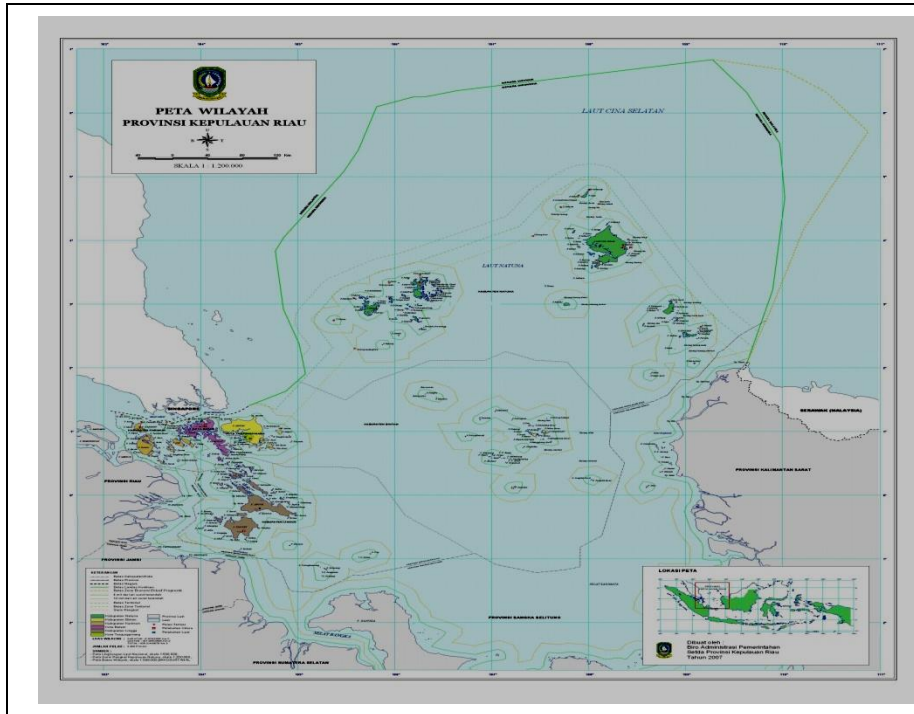


Lampiran I
Peraturan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Nomor
Tanggal

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kepulauan Riau



Perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata daerah Provinsi Kepulauan Riau mencakup:

- 1. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Batam**
- 2. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Bintan**
- 3. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Karimun**
- 4. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Tanjungpinang**
- 5. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Natuna**
- 6. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Anambas**
- 7. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Lingga**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

H. M. SANI

Lampiran II
Peraturan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Nomor
Tanggal

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KEPULAUAN RIAU :

- Bagian – 1 : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI
PARIWISATA
- Bagian – 2 : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN
PARIWISATA
- Bagian – 3 : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI
PARIWISATA
- Bagian – 4 : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN
PARIWISATA

1. DESTINASI PARIWISATA

1.1. PERWILAYAHAN DESTINASI PARIWISATA

Arah Kebijakan 1: Perencanaan pembangunan Koridor Pariwisata Daerah dan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Menyusun Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah dan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah ;	1.1. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) di masing-masing Koridor Pariwisata Daerah				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		1.2. Penyusunan Master Plan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah				
2.	Menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan Koridor Pariwisata Daerah dan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah	2.1. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Tata Lingkungan Koridor Pariwisata Daerah dan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah				SKPD yang bertanggung jawab di bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan

Arah Kebijakan 2: Penegakan Regulasi Pembangunan Koridor Pariwisata Daerah dan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah dan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah	1.1.Penyusunan Tata Cara / Petunjuk Teknis Penetapan DPUD				SKPD yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata , Prasarana Wilayah dan Lingkungan
		1.2.Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Master Plan Pembangunan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah				
		1.3.Penyiapan rancangan peraturan tentang tata bangunan dan lingkungan pada daya tarik wisata prioritas di Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah				
		1.4.Penetapan Perda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah				
		1.5.Penetapan Regulasi tentang Indikasi Program Pembangunan Pariwisata Daerah Kepulauan Riau				
		1.6.Penetapan Regulasi Tentang Tata Bangunan dan Tata Lingkungan pada daya tarik wisata prioritas di Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah Kepulauan Riau				

Arah Kebijakan 3: Pengendalian Implementasi Pembangunan Koridor Pariwisata Daerah dan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat	1.1. Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		1.2. Pembentukan Forum Kordinasi Teknis Kepariwisataaan				

1.2. PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA

Arah Kebijakan 1: Perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Koridor Pariwisata Daerah dan pengembangan daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan daya tarik wisata baru di Koridor Pariwisata Daerah	1.1. Fasilitasi perintisan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya dan khusus/ buatan bagi segmen wisata massal (<i>mass market</i>) maupun bagi segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>) di kawasan yang belum berkembang				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		1.2. Fasilitasi perencanaan dan perintisan pengembangan sarana prasarana dasar di kawasan yang belum berkembang				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Prasarana Wilayah
		1.3. Fasilitasi pemberian arahan bagi masyarakat setempat mengenai pengelolaan dan pemeliharaan destinasi untuk mewujudkan <i>community based tourism</i> di kawasan yang belum berkembang.				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		1.4. Fasilitasi para pelaku usaha didalam pengembangan kawasan pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan

Arah Kebijakan 2: Pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan Koridor Pariwisata Daerah	1.1. Penguatan interpretasi dan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing daya tarik wisata alam, budaya dan khusus/ buatan yang sedang berkembang				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		1.2. Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata terkait di sekitar lokasi dalam konteks regional, maupun nasional dan internasional				
		1.3. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata				

Arah Kebijakan 3: Pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata	1.1. Pengembangan rentang aktifitas wisata dalam berbagai skala (<i>hard - soft attraction</i>) pada manajemen atraksi daya tarik wisata alam, budaya dan buatan/ khusus untuk menarik segmen wisatawan massal (<i>mass market</i>) dan segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>).				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		1.2. Pengembangan jenis-jenis atraksi lain dengan berbagai tema di sekitar lokasi daya tarik wisata utamanya serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan terpadu yang saling melengkapi				

Arah Kebijakan 4: Pengembangan daya tarik wisata berdasarkan keunggulan komparatif masing-masing Koridor Pariwisata Daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Pengembangan KPD Batam sebagai kawasan Wisata Kota, Wisata Bahari dan Wisata MICE (<i>meeting, incentive, convention and exhibition</i>)	1.1. Mengembangkan KPP Batam sebagai kawasan wisata MICE dan wisata Belanja. 1.2. Mengembangkan KPP Bulang dan Belakang Padang sebagai kawasan wisata bahari dan wisata budaya. 1.3. Mengembangkan KPP Galang dan Galang Baru sebagai kawasan wisata bahari, sejarah dan agrowisata.				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya.
2.	Pengembangan KPD Bintan sebagai kawasan Wisata Terpadu Eksklusif (KWTE) dan Kawasan Wisata Terbuka Umum (KWTU)	2.1. Mengembangkan Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif Bintan sebagai pusat kawasan wisata terpadu berstandar internasional. 2.2. Mengembangkan Kawasan Wisata Terbuka Umum Bintan sebagai kawasan wisata bahari, rekreasi keluarga, wisata alam, ekowisata dan desa wisata.				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya.
3.	Pengembangan KPD Karimun sebagai kawasan Wisata Minat Khusus, Wisata Alam dan Wisata Agro;	3.1. Mengembangkan KPP Karimun Utara sebagai kawasan wisata bahari, sejarah dan wisata alam. 3.2. Mengembangkan KPP Karimun Selatan sebagai kawasan wisata minat khusus				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		<p>3.3. Mengembangkan KPP Pulau Papan sebagai kawasan wisata bahari dan wisata alam.</p> <p>3.4. Mengembangkan KPP Kundur sebagai kawasan wisata bahari dan wisata agro.</p> <p>3.5. Mengembangkan KPP Moro sebagai kawasan wisata bahari dan minat khusus.</p>				dan SKPD terkait lainnya.
4.	Pengembangan KPD Tanjungpinang sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya, dan Wisata Kreatif;	<p>4.1. Mengembangkan KPP Penyengat – Senggarang – Pulau Rebah sebagai kawasan wisata sejarah, wisata religi dan wisata budaya.</p> <p>4.2. Mengembangkan KPP Tanjung Pinang sebagai kawasan wisata kreatif dan wisata budaya.</p>				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
5.	Pengembangan KPD Natuna sebagai kawasan Wisata Bahari dan Eko Wisata;	<p>5.1. Mengembangkan KPP Bumi Laut (Bunguran, Midai, Pulau Tiga, Pulau Laut) sebagai kawasan wisata terpadu, wisata bahari dan ekowisata.</p> <p>5.2. Mengembangkan KPP Serabi (Serasan, Subi) sebagai kawasan wisata bahari dan ekowisata.</p>				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
6.	Pengembangan KPD Anambas sebagai kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata	<p>6.1. Mengembangkan KPP Siantan sebagai kawasan wisata terpadu, wisata bahari dan ekowisata.</p> <p>6.2. Mengembangkan KPP Tambelan sebagai kawasan wisata bahari dan wisata budaya.</p>				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
7.	Pengembangan KPD Lingga sebagai kawasan Wisata Sejarah, Budaya, dan Wisata Alam	<p>7.1. Mengembangkan KPP Daik Lingga sebagai kawasan wisata sejarah, wisata budaya dan wisata alam.</p> <p>7.2. Mengembangkan KPP Singkep sebagai kawasan wisata bahari dan wisata alam.</p> <p>7.3. Mengembangkan KPP Senayang sebagai kawasan wisata minat khusus .</p>				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya

1.3. PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA

Arah Kebijakan1: Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pariwisata Dalam Mendukung Perintisan Pengembangan Kawasan Pariwisata Kepulauan Riau

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan kawasan pariwisata	1.1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pengembangan sarana usaha pariwisata dengan nilai kompetitif				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan, prasarana wilayah, dan sektor terkait lainnya
		1.1. Fasilitasi kemudahan perijinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata				
		1.2. Fasilitasi kemudahan pinjaman bank dengan suku bunga yang rendah bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata				
2.	Mengembangkan prasarana/infrastruktur dasar untuk mendukung kesiapan kawasan pariwisata sebagai destinasi wisata baru/rintisan dan/atau kawasan pariwisata yang akan dikembangkan	2.1. Fasilitas perintisan penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan di kawasan pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah
		2.2. Fasilitasi perintisan pembangunan jaringan air bersih di kawasan pariwisata				
		2.3. Fasilitasi pembangunan jaringan telekomunikasi di kawasan pariwisata				
		2.4. Fasilitasi penyediaan dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata di kawasan pariwisata				
		2.5. Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata (<i>souvenir shop</i>) di kawasan pariwisata				

Arah Kebijakan 2: Meningkatkan kualitas prasarana umum dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan daya saing koridor pariwisata daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta (<i>public private partnership</i>)	1.1. Pengembangan skema regulasi untuk mengatur peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di kawasan pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah
		1.2. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan kemitraan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di kawasan pariwisata				
2.	Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan	2.1. Pemberian kemandirian peran dan tanggung jawab kepada otoritas pengelola kawasan pariwisata yang sudah mapan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah
		2.2. Pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah secara otonom dalam pengelolaan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada kawasan pariwisata yang sudah berkembang				

Arah Kebijakan 3: Pengendalian Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Menyusun regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan	1.1. Pengembangan skema pembatasan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata pada kawasan pariwisata dalam rangka menjaga keberlanjutan daya dukung				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah dan Lingkungan
		1.2. Kordinasi perijinan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata pada kawasan pariwisata untuk menjaga keberlanjutan daya dukung suatu kawasan pariwisata				
2.	Mendorong penegakan peraturan perundang-undangan	2.1. Pengembangan skema insentif dan disinsentif dalam pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata pada kawasan pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah dan Lingkungan
		2.2. Meningkatkan pengawasan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang dapat berdampak negatif bagi lingkungan				
		2.2. Peningkatan peran dan tanggung jawab swasta dalam pemeliharaan sarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata pada kawasan pariwisata				

1.4. AKSESIBILITAS DAN/ ATAU TRANSPORTASI PARIWISATA

Arah kebijakan 1 : Pengembangan Moda Transportasi Dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan sarana moda transportasi darat, laut, angkutan sungai dan penyeberangan dan transportasi yang menghubungkan antar koridor pariwisata daerah	1.1. Pengembangan angkutan wisata darat yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
		1.2. Mengembangkan moda transportasi yang hemat energi dan ramah lingkungan				
		1.3. Pengembangan angkutan wisata laut antar koridor pariwisata daerah yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan				
		1.4. Pengembangan kerjasama dengan perusahaan angkutan umum dan angkutan khusus milik swasta dalam rangka mendukung aksesibilitas antar koridor pariwisata daerah				
		1.5. Pengembangan kerjasama dengan perusahaan angkutan umum dan angkutan khusus milik swasta dalam rangka peningkatan kualitas layanan bagi wisatawan				
		1.6. Penyusunan studi kebutuhan moda transportasi antar koridor pariwisata daerah				

Arah kebijakan 2 : Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, ASDP dan udara yang menghubungkan antar koridor pariwisata daerah	1.1. Pembangunan <i>shelter</i> bis pariwisata di tiap-tiap kawasan wisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan dan BUMD
		1.2. Peningkatan kualitas terminal bis dan angkutan umum				
		1.3. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan				
		1.4. Peningkatan kualitas dan kuantitas <i>tourism signage</i>				
		1.5. Penyusunan studi kebutuhan pengembangan prasarana transportasi dimasing-masing koridor pariwisata daerah, contoh : kebutuhan sarana “cable car” yang menghubungkan tanjungpinang dengan penyengat				
		1.6. Penambahan Armada Transportasi Bus Pariwisata untuk jalur- jalur tertentu				
		1.7. Pembangunan dermaga/pelabuhan/marina untuk pengembangan wisata bahari (cruise dan sailing)				
		1.8. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung pengembangan wisata bahari (diving, snorkling, fishing)				
		1.9. Peningkatan kapasitas bandar udara di koridor pariwisata daerah				
		1.10. Penyediaan kapal-kapal wisata untuk mendukung pengembangan wisata bahari dan eco-tourism (island tour)				

Arah kebijakan 3: Pengembangan Sistem Transportasi dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Sistem transportasi darat, laut, ASDP dan udara yang menghubungkan antar koridor pariwisata daerah	1.1. Penerapan manajemen kelalulintasan dalam pengaturan jalur lalu lintas darat, laut, ASDP dan udara				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
		1.2. Mengembangkan sistem dan jejaring informasi transportasi darat, laut, ASDP dan udara				
		1.3. Peningkatan sistem kepastian jadwal keberangkatan dan kedatangan moda transportasi				
		1.4. Peningkatan jam operasi angkutan umum				
		1.5. Meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan dan keselamatan jasa transportasi pariwisata				
		1.6. Penerapan manajemen kelalulintasan dalam pengaturan jalur penerbangan				
		1.7. Pengembangan kerjasama dengan berbagai maskapai internasional (<i>global airlines</i>)				
		1.8. Peningkatan pelayanan CIQP (custom, immigration, quarantine, port) di masing-masing pelabuhan pariwisata				
		1.9. Meningkatkan sistem pelayanan keamanan laut				

1.5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PARIWISATA

Arah kebijakan 1: Peningkatan Kapasitas dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kepariwisataan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan	1.1. Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan 1.2. Peningkatan intensitas keterlibatan lembaga masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
2.	Mengembangkan Keterlibatan masyarakat dalam pola DMO (destination management organization) dalam pengembangan kepariwisataan	2.1. Pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		2.2. Perintisan pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan				
		2.3. Pelatihan dan Pendidikan tentang DMO				

Arah kebijakan 2: Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat di Bidang Kepariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan kapasitas/skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata	1.1. Fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan usaha wisata yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar kawasan pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata , Koperasi & UKM
		1.2. Fasilitasi pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar kawasan pariwisata				
		1.3. Fasilitasi pemberian modal usaha kecil menengah bagi masyarakat di bidang pariwisata				
		1.4. Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dalam pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi				
2.	Mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal	2.1. Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat 2.2. Menyusun regulasi yang mendorong keterlibatan pihak swasta untuk mendukung pengembangan usaha ekonomi masyarakat melalui program <i>corporate social responbility</i> (CSR)				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata

Arah kebijakan 3: Penguatan Kesadaran Wisata Masyarakat

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan motivasi, kesempatan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai tanah air	1.1. Mengembangkan kegiatan study tour pariwisata di kalangan usia sekolah 1.2. Mengembangkan kurikulum lokal berbasis budaya dan sejarah daerah 1.3. Mengembangkan minat baca tulis remaja usia sekolah akan sejarah, seni dan budaya				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pendidikan
2.	Meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapa pesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan setempat	2.1. Peningkatan sosialisasi sadar wisata pada masyarakat lokal 2.2. Pengembangan media <i>campaign</i> pada media massa lokal (cetak) dan elektronik tentang sadar wisata 2.3. Pembinaan dan penataan kawasan wisata dan komunitas masyarakat yang mencerminkan prinsip-prinsip sadar wisata/ sapa pesona 2.4. Revitalisasi kelompok sadar wisata dan lembaga masyarakat untuk mendukung pengembangan pariwisata 2.5. Pemberian bantuan fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan masyarakat lokal di sekitar kawasan pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata

1.6. INVESTASI PARIWISATA

Arah kebijakan 1: Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi dibidang Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan perbaikan jasa pelayanan perpajakan untuk investasi penanaman modal dalam negeri dan modal asing di sektor pariwisata	1.1. Penetapan Keringanan Pajak dalam periode waktu tertentu bagi Pengembangan Investasi				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Perpajakan Daerah
		1.2. Menurunkan tarif pajak daerah yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga/jasa				
2.	Mengusulkan adanya Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata	2.1. Penyusunan studi potensi KEK pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata dan sektor terkait lainnya
		2.2. Kordinasi dengan pemerintah pusat				
		2.3. Membangun kesamaan persepsi tentang KEK pariwisata dengan seluruh unsur penyelenggara pemerintahan dan stakeholder di daerah.				

Arah kebijakan 2: Peningkatan Kemudahan Investasi di Bidang Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Deregulasi peraturan yang menghambat perizinan	1.1. Penyesuaian atau kemudahan urusan kontrak tenaga kerja 1.2. Pengurangan jenis peraturan perijinan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata dan sektor terkait lainnya

Arah kebijakan 3: Peningkatan Promosi Investasi Di Bidang Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan sistim informasi investasi dibidang pariwisata	1.1. Penyediaan informasi profil investasi daerah				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
2.	Meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri	2.1. Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		2.2. Pengembangan sekretariat bersama promosi investasi				
		2.3. Pengembangan berbagai marketing kit investasi				
		2.4. promosi investasi sektor pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet				
		2.5. Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan.				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		2.6. Penetapan negara-negara potensial sasaran promosi investasi pariwisata Kepulauan Riau				
		2.7. <i>Road show</i> promosi investasi sektor pariwisata ke negara-negara potensial				
3.	Meningkatkan sinergi promosi penanaman modal di bidang pariwisata dengan sektor terkait	3.1. Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait promosi investasi				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata dan sektor terkait

2. PEMASARAN PARIWISATA

2.1. Pasar Wisatawan

Arah kebijakan 1: Pemanjapan Segmen Pasar Wisatawan Massal (Mass Market) dan Pengembangan Segmen Ceruk Pasar (Niche Market) dalam Mengoptimalkan Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Dinamika Pasar Global

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata yang diprioritaskan	1.1. Intensifikasi promosi produk-produk wisata unggulan daerah				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata dan Badan Promosi Pariwisata Daerah
2.	Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu	2.1. Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui <i>community marketing</i> dan kampanye pemasaran secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema.				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata dan Badan Promosi Pariwisata Daerah
		2.2. Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan massal				
		2.3. Pengembangan bahan promosi secara tematik				
3.	Akselerasi pergerakan wisatawan	3.1. Penciptaan program pemasaran dan promosi produk terpadu meliputi: penciptaan skema-skema promosi silang di sepanjang mata rantai industri pariwisata dan yang terkait				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata dan Badan Promosi
		3.2. Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis komunitas (<i>community marketing</i>), melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Promosi wisata pada media khusus komunitas tertentu (biling, majalah hobi, buletin organisasi, dll). 				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		<p>b. Pemanfaatan pertemuan/event komunitas tertentu sebagai media promosi (pertemuan keluarga, komunitas hobi, dll).</p> <p>3.3. Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air, melalui:</p> <p>a. Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dll)</p> <p>b. Pengembangan insentif dan kerjasama antar pelaku industri pariwisata dengan institusi pendidikan</p> <p>3.4. Peningkatan kemudahan akses dan skema pembiayaan perjalanan wisata, melalui:</p> <p>a. Potongan harga terusan (<i>circuit discount</i>)</p> <p>b. Keuntungan ganda atas jasa tertentu (<i>double benefit</i>)</p> <p>c. Kartu keanggotaan (<i>traveller/expatriate card</i>)</p> <p>d. One entry ticket yang berlaku untuk beberapa obyek wisata</p> <p>3.5. Intensifikasi pemasaran paket wisata dan event tematik tertentu (tradisi kelokalan, religious, weekenders, dan sebagainya, seperti: paket wisata untuk keluarga, kerabat, klan, dll,)</p>				Pariwisata Daerah
4.	Intensifikasi pemasaran MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain.	<p>4.1. Pemasaran MICE kepada komunitas profesi seperti akuntan, dokter, arsitek, dll.</p> <p>4.2. Pendukung bidding sebagai tuan rumah (<i>host</i>) MICE berskala internasional</p> <p>4.3. Penyusunan <i>Guidelines</i> (NSPK) untuk pendukung <i>bidding</i> sebagai tuan rumah (<i>host</i>) MICE berskala internasional</p> <p>4.4. Fasilitasi MICE yang dilakukan oleh sektor lain: kesehatan, kelautan dan perikanan, pendidikan, kehutanan dll</p> <p>4.5. Kerjasama pemasaran MICE dengan PHRI</p>				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata & Badan Promosi Pariwisata Daerah

2.2. CITRA PARIWISATA

Arah kebijakan1: Pengembangan dan Pematapan Citra Kepulauan Riau sebagai Destinasi Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan dan memantapkan positioning	1.1. Penilaian dan penajaman kembali strategi <i>positioning</i> pariwisata Kepulauan Riau dengan memfokuskan upaya promosi pada pasar domestik : Intensifikasi implementasi Kampanye “Kepri : <i>The Beauty of Nature</i> ”				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		1.2. Penilaian dan penajaman kembali strategi <i>positioning</i> pariwisata Kepulauan Riau yang berfokus pada core tourism products : MICE, Marine, Culture & Heritage				
		1.3. Pengembangan program pemasaran dan promosi yang bermuara pada <i>brand image</i> yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan				
		1.4. Pengembangan media sosial sebagai media komunikasi utama dalam menyebarluaskan <i>brand image</i> daerah				

Arah kebijakan 2: Pengembangan Citra Kepariwisata Kepulauan Riau sebagai Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman dan Berdaya Saing

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan kehadiran media dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata	1.1. Pengembangan <i>KEPRI TOURISM CALL CENTER</i>				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		1.2. Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran yang meliputi media <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam tiga aras yaitu <i>social</i> , <i>mobile</i> , dan <i>experiential</i> .				
		1.3. Peningkatan kualitas <i>websites</i> pariwisata Kepulauan Riau				
		1.4. Pengembangan Kepri <i>tourism cyber campaign</i> , melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>E-Magazine, E-Brochure, E-Tourism Guide, interactive tools, dll</i> b. <i>Social networking machines (facebook, twitter, youtube, my space, flickr, dll)</i> c. <i>Online events (contest, blogging events, dll)</i> 				
		1.5. Pengembangan <i>linkage</i> jaringan <i>e-marketing</i> pariwisata				
		1.6. Pengembangan promosi produk-produk wisata minat khusus melalui <i>online portals</i>				

2.3. KEMITRAAN PEMASARAN PARIWISATA

Arah kebijakan 1: Peningkatan Peran Media Komunikasi Pemasaran Dalam Memasarkan Dan Mempromosikan Wisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik	1.1. Intensifikasi promosi paket-paket wisata melalui brosur-brosur, majalah, surat kabar, dll yang populer dibaca masyarakat Kepulauan Riau dalam bentuk advertorial				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		1.2. Intensifikasi promosi wisata melalui program acara televisi dan radio, baik lokal, nasional, dan internasional				
		1.3. Intensifikasi promosi <i>printing</i> material : brosur, leaflet dengan tema tertentu (<i>Heritage, MICE, Culture & Marine</i>)				
		1.4. Pendistribusian Kit Promosi dalam bentuk CD, DVD kepada segenap pelaku usaha, dan pemerintah daerah yang diperkirakan memiliki keterkaitan pasar				
2.	Mengembangkan <i>E-Marketing</i>	2.1. Pengembangan pemasaran dan promosi wisata Kepulauan Riau melalui website pariwisata misalnya mengenalkan destinasi-destinasi domestik atau daya tarik wisata minat khusus yang sesuai untuk segmen wisatawan nusantara dan mancanegara				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata dan Badan Promosi Pariwisata Daerah
		2.2. Mengoptimalkan penggunaan social media marketing (<i>Facebook, Twitter, Youtube</i>) sebagai media komunikasi pemasaran untuk segala segmen dan beragam jenis program promosi wisatawan nusantara dan mancanegara				
		2.3. Pengembangan Kepri tourism cyber campaign, melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>E-Magazine, E-Brochure, E-Tourism Guide, interactive tools</i>, dll b. <i>Social networking machines</i> (facebook, twitter, youtube, my 				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		space, flickr, dll) c. <i>Online events (contest, blogging events, dll)</i>				
		2.4. Peningkatan kualitas websites pariwisata Kepulauan Riau melalui peningkatan dan pengkayaan fitur-fitur terkini <i>e-book, e-brochure</i>				
		2.5. Pengenalan dan sosialisasi market intelligence untuk segmen wisatawan nusantara dan mancanegara (pembuatan program cerdas melalui website seperti yang sudah disediakan oleh para provider agen perjalanan)				
		2.6. Community Marketing dengan melibatkan komunitas <i>hobbies</i> (motor, mobil) untuk menyelenggarakan event-event khusus (<i>Gathering, Auto Contest, Konser Amal, dsb</i>)				

Arah kebijakan 2: Pengembangan Kemitraan Pemasaran yang Terpadu, Sinergis, Berkesinambungan dan Berkelanjutan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata daerah	1.1. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan upaya peningkatan ekspor dan pengembangan investasi. 1.2. Penguatan promosi bermitra (<i>co-marketing</i>) dengan pelaku usaha pariwisata 1.3. Pengembangan fasilitas penjualan secara langsung (<i>e-commerce</i>) kepada wisatawan untuk dapat membeli paket wisata secara langsung				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
2.	Mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan	2.1. Pengembangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta implementasi Pemasaran pariwisata yang bertanggungjawab				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		2.2. Pengembangan konten bahan promosi pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah (<i>host</i>) dan penerima manfaat.				
		2.3. Peningkatan penggunaan media promosi pariwisata yang ramah lingkungan. (<i>paperless and recyclable material</i>)				
		2.4. Pengembangan misi pendidikan melalui berbagai bentuk media kepada wisatawan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>), seperti pengembangan panduan <i>does and don'ts</i> , <i>interpretation kit</i> , dan film iklan <i>responsible tourism behavior</i>				
		2.5. Pengembangan pola-pola insentif dan penghargaan (<i>reward</i>) untuk upaya pemasaran yang bertanggungjawab kepada pelaku usaha pariwisata				
		2.6. Pengembangan pola-pola sanksi (<i>punishment</i>) untuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemasaran yang bertanggungjawab.				

2.4. PROMOSI PARIWISATA

Arah kebijakan 1: Penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kepulauan Riau di dalam negeri

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri	1.1. Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan massal melalui Direct Selling atau event-event di pusat perbelanjaan dalam bentuk direct selling - consumer show dan mall promotion di kota-kota besar.				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata dan Badan Promosi Pariwisata Daerah
		1.2. Mengoptimalkan penggunaan social media marketing (Facebook, Twitter, Youtube) sebagai media komunikasi pemasaran untuk segala segmen dan beragam jenis program promosi wisatawan di Kab/Kota di Kepri				
		1.3. Pengembangan promosi terpadu untuk event pariwisata dan budaya yang diselenggarakan di Kepri (dukungan even daerah)				
		1.4. Promosi pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet				
		1.5. Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait promosi pariwisata daerah di Kab/Kota di Kepri				
		1.6. Pemberian fasilitas/ruang display bagi para pengusaha kecil di bidang pariwisata untuk memamerkan produknya dan cendera mata khas daerah di hotel.				
		1.7. Pengembangan cetak biru promosi pariwisata dalam negeri				

2.	Menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah Kepulauan Riau dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia	2.1. Pembentukan dan operasionalisasi BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah) Kepulauan Riau			
		2.2. Pengembangan kerjasama promosi pariwisata Kepulauan Riau antara BPPD dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia			
		2.3. Pengembangan Pusat informasi digital di setiap kawasan wisata berkelas nasional dan internasional yang diselenggarakan oleh BPPD Kepulauan Riau			

Arah kebijakan 2: Penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kepulauan Riau di luar negeri

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Menguatkan fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Kepulauan Riau di luar negeri	1.1. Partisipasi pada event-event / pameran di luar negeri dalam rangka mempromosikan pariwisata di Kepri				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata dan Badan Promosi Pariwisata Daerah
		1.2. Pengembangan jaringan informasi pariwisata di berbagai lokasi strategis, seperti pelabuhan udara dan laut				
		1.3. Pengembangan cetak biru promosi pariwisata luar negeri				
2.	Menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Kepulauan Riau di luar negeri melalui VITO (<i>visitor indonesian tourism officer</i>)	2.1. Pengembangan fasilitas penjualan secara langsung (e-commerce) kepada wisatawan untuk dapat membeli paket wisata secara langsung.				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		2.2. Menjalinkan kerjasama promosi pariwisata dengan media cetak dan travel agent luar negeri melalui VITO				

3. INDUSTRI PARIWISATA

Arah kebijakan 1: Peningkatan Kualitas dan Keragaman Produk-Produk Usaha Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan daya saing usaha pariwisata	1.1.Peningkatan sertifikasi seluruh usaha pariwisata di Kepulauan Riau				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		1.2.Peningkatan standarisasi seluruh usaha pariwisata dari level nasional ke internasional				
		1.3.Peningkatan kemampuan <i>managerial</i> dalam pengelolaan usaha pariwisata berdaya saing internasional				
		1.4.Peningkatan kualitas hotel di seluruh kawasan				
		1.5.Peningkatan standard dan kualitas hotel sebagai sarana MICE bertaraf internasional				
		1.6.Pengembangan sistem <i>informal booking service</i> bebas biaya untuk semua produk/jasa pariwisata yang dijual di Kepulauan Riau (bekerjasama dengan provider telekomunikasi)				
2.	Menciptakan iklim usaha yang kondusif	2.1.Pengembangan sistem pendaftaran integratif untuk jenis usaha pariwisata yang meliputi multi-aktivitas dan multi-produk (contoh: <i>perhotelan</i>)				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		2.2.Penetapan penggunaan mata uang rupiah (<i>price quotation</i>) dalam penjualan produk wisata di Kepulauan Riau				
		2.3.Peningkatan perlindungan usaha bagi industri spa lokal				
		2.4.Pengembangan sistem pendaftaran usaha pariwisata satu atap				

Arah kebijakan 2: Pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang Kredibel dan Berkualitas

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan sistem dan skema fasilitasi untuk usaha pariwisata	1.1. Pengembangan insentif perizinan untuk melindungi industri pariwisata lokal				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata dan sektor terkait lainnya
		1.2. Fasilitasi komunikasi antara pemerintah, usaha pariwisata, dan masyarakat dengan menyelenggarakan forum koordinasi dan komunikasi secara reguler				
		1.3. Pemberian insentif kepada industri pariwisata yang menggunakan produk lokal dan produk UMKM				
		1.4. Pemberian fasilitas/ ruang display bagi para pengusaha kecil di bidang pariwisata untuk memamerkan produknya dan cendera mata khas daerah di hotel				
2.	Meningkatkan sistem dan skema regulasi untuk usaha pariwisata	2.1. Peninjauan ulang prosedur dan persyaratan pemberian izin pada perusahaan asing agar tidak merugikan usaha pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
3.	Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam usaha-usaha di kawasan pariwisata	3.1. Pengembangan Pusat informasi digital di setiap kawasan wisata berkelas nasional dan internasional				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		3.2. Pengembangan Jaringan Kerjasama secara <i>online</i> antar kawasan pariwisata				
		3.3. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) di kawasan pariwisata di Kepulauan Riau				

Arah kebijakan 3: Penguatan Struktur Usaha Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Memfasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata	1.1. Memfasilitasi terbentuknya Gabungan Industri Pariwisata Daerah Kepulauan Riau sebagai wadah dan koordinator kerjasama yang sinergis antar usaha pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
2.	Memperkuat mata rantai penciptaan nilai	2.1. Intensifikasi dan efisiensi badan-badan promosi yang telah ada untuk kembali digunakan sebagai wahana promosi bersama dengan sumber dana yang ditanggung bersama				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		2.2. Pengembangan dukungan promosi di kawasan strategis				
		2.3. Pengembangan dukungan promosi di kawasan tertinggal				
		2.4. Peningkatan program pengembangan kawasan dalam menyalurkan dana CSR dari usaha-usaha pariwisata				
		2.5. Pengembangan skema kerjasama antarusaha pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk wisata				

Arah kebijakan 4: Penguatan Kemitraan Usaha Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	Strategi	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan pola-pola kerjasama industri lintas sektor antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat	1.1. Peningkatan penyerapan <i>local content</i> dalam usaha akomodasi/hotel yaitu harus menggunakan sekurang-kurangnya 30% bahan lokal				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		1.2. Penggunaan sumber daya lokal (SDM dan sumber daya lainnya) dalam penyelenggaraan usaha pariwisata, (misal: hotel harus menggunakan sekurang-kurangnya 30% bahan lokal)				
		1.3. Penerapan penggunaan minimal 30% bahan lokal dalam seluruh rantai industri pariwisata				
		1.4. Penerapan penggunaan minimal 30% SDM lokal dalam penyelenggaraan usaha pariwisata				
2.	Menguatkan implementasi kerjasama dan monitoring serta evaluasi kerja sama antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat	2.1. Pengembangan forum kordinasi implementasi program kerjasama antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		2.2. Pengembangan forum kordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program kerjasama dalam meningkatkan sadar wisata melalui sapta pesona				
		2.3. Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi pariwisata				
		2.4. Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap masyarakat				

Arah kebijakan 5: Pengembangan Manajemen Usaha Pariwisata Yang Mengacu Pada Prinsip Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	Strategi	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Mendorong tumbuhnya industri yang ramah lingkungan di Koridor – Koridor Pariwisata Daerah	1.1. Pengembangan dan pedoman dan implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk usaha-usaha pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata dan Lingkungan
		1.2. Pengembangan pedoman pelestarian sumber daya alam dan budaya untuk usaha-usaha pariwisata				
2	Mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya	1.3. Pengembangan skema dan implementasi program CSR yang mendukung pengembangan destinasi wisata dan masyarakat				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata dan kebudayaan
		1.4. Pengembangan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian budaya setempat				

4. KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

4.1. Organisasi Pariwisata

Arah kebijakan 1: Restrukturisasi dan Reposisi Organisasi Kepariwisata Di Tingkat Provinsi

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mereposisi Urusan Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah	1.1. Peninjauan kembali SOT Dinas Pariwisata terhadap perkembangan pariwisata daerah, nasional dan internasional				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		1.2. Peningkatan anggaran untuk pengembangan pariwisata				

Arah kebijakan 2: Optimalisasi Koordinasi Antar Dinas dan Dengan Kabupaten/Kota

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Merencanakan partisipatif koordinasi lintas sektor (merujuk pada Inpres 16 tahun 2005 tentang Arah kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata)	1.1. Revitalisasi ataupun pembentukan unit kerja yang berfungsi mengkoordinasikan dan menggerakkan sinergi lintas sektor				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata dan BAPPEDA
		1.2. Menginsentifkan komunikasi antar dinas dan dengan Kabupaten/Kota				
		1.3. Monitoring dan evaluasi <i>performance</i> unit kerja koordinasi lintas sektor.				

Arah kebijakan 3: Optimalisasi Organisasi Kepariwisata Swasta dan Masyarakat Di Tingkat Provinsi

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Memperkuat peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui <i>Public-private Partnership</i> (PPP)	1.1. Pembentukan dan operasionalisasi GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia) di tingkat Provinsi Kepulauan Riau				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		1.2. Pembentukan dan operasionalisasi BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah) Kepulauan Riau				
2.	Mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang pariwisata	2.1. Fasilitasi peningkatan peran organisasi masyarakat				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		2.2. Mengarahkan dana masyarakat di perusahaan-perusahaan swasta (CSR) untuk pembinaan organisasi masyarakat di bidang pariwisata				

Arah kebijakan 4: Optimalisasi Kemitraan Usaha Pariwisata Antara Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Memperkuatsinkronisasi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat	1.1. Perencanaan partisipatif usaha pariwisata melalui skema kemitraan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		1.2. Pembentukan forum-forum koordinasi usaha pariwisata				
2.	Memperbaiki pelayanan pemerintah kepada swasta dan masyarakat	2.1. Pengembangan pelayanan satu atap dalam perijinan				
		2.2. Deregulasi dan debirokratisasi peraturan-peraturan terkait dengan kepariwisataan				
		2.3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.				

4.2. SDM PARIWISATA

Arah kebijakan 1: Optimalisasi dan Akselerasi Kompetensi SDM Pemerintah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Optimalisasi kapasitas SDM di provinsi dan kabupaten/kota.	1.1. Program <i>technical assistance</i> (<i>outsourcing</i> SDM)				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		1.2. Program magang (<i>training program</i>)				
		1.3. Program pendidikan pengembangan pariwisata (perencanaan, implementasi, dan money)				
2.	Mempetakan kualifikasi kompetensi SDM	2.1. Pemetaan kebutuhan kualifikasi pejabat dan staff (teknis dan non teknis)				

Arah kebijakan 2: Akselerasi Kualitas Institusi Pendidikan Kepariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan institusi pendidikan pariwisata	1.1. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah pariwisata jenjang sekolah menengah, diploma, S1 dan S2				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan Pendidikan
		1.2. Pemutakhiran kurikulum untuk semua jenjang pendidikan pariwisata dengan standar internasional (<i>Common Asean Tourism Curriculum</i> , yang bisa mendapat pengakuan UNWTO)				
		1.3. Pemutakhiran kurikulum untuk profesi teknis/non gelar (perhotelan, pemandu wisata dll) dengan standar internasional.				
		1.4. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan kepariwisataan bertaraf internasional				
		1.5. Remodifikasi kurikulum untuk penjenjangan profesi pariwisata (lisensi muda-madya-utama)				
2.	Mengembangkan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri pariwisata	2.1. Kolaborasi pemerintah dan industri pariwisata untuk program CO-OP mahasiswa (magang).				
		2.2. Kolaborasi pemerintah dan industri pariwisata dalam penyaluran lulusan.				
		2.3. Program <i>Apprenticeship</i> (Magang) di institusi pendidikan pariwisata dan perhotelan di luar negeri untuk tenaga pengajar				

Arah kebijakan 3: Standarisasi dan Sertifikasi Tenaga Pendidik

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Sertifikasi profesi tenaga pendidik (dosen)	1.1. Sertifikasi tenaga pendidik.				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan kependidikan
		1.2. Akselerasi kemampuan penelitian dan pengajaran tenaga pendidik S1 dan S2.				
		1.3. Pengakuan sertifikasi yang telah diberikan oleh lembaga pendidikan lain (<i>Waive of Certification</i>)				
2.	Akselerasi kualitas pendidik kepariwisataan.	2.1. Pemberian Beasiswa S2 dan S3				
		2.2. Inisiasi (pemprakarsaan) pembentukan Pusat Kajian Pariwisata baik di perguruan tinggi pariwisata maupun umum.				

Arah kebijakan 4: Optimalisasi Kuantitas SDM Industri Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Perancangan jangka panjang kebutuhan SDM industri Pariwisata	1.1. Pendataan dan Inventarisasi SDM (jumlah, kualifikasi, Masa kerja, pengetahuan dan ketrampilan/pelatihan, bakat dan minat karyawan)				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
2.	Pemetaan dan pengadaan SDM industri di tiap-tiap kawasan wisata.	2.1. Pemetaan proyeksi kebutuhan SDM industri di tiap-tiap kawasan pengembangan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		2.2. Perencanaan kebutuhan level dan karakter kompetensi SDM di tiap-tiap kawasan berdasar tema produk wisata				
		2.3. Pemetaan proyeksi dan perencanaan kebutuhan level dan karakter SDM pariwisata di kawasan				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
3.	Sertifikasi profesi di bidang kepariwisataan	3.1. Sertifikasi tenaga di bidang kepariwisataan.				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		3.2. Akselerasi kemampuan tenaga di bidang kepariwisataan				
		3.3. Pengakuan sertifikasi yang telah diberikan oleh lembaga pendidikan lain (<i>Waive of Certification</i>)				

4.3. Penyelenggaran Penelitian dan Pengembangan

Arah kebijakan 1: Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan daya tarik wisata	<p>1.1. Pengembangan penelitian tentang perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata dan pengembangan daerah</p> <p>1.2. Pengembangan penelitian tentang pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada</p> <p>1.3. Pengembangan penelitian tentang pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas</p> <p>1.4. Pengembangan penelitian tentang revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan destinasi pariwisata</p>				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
2.	Meningkan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung KPD	<p>2.1. Pengembangan penelitian tentang pembangunan sarana transportasi angkutan jalan, ASDP, angkutan laut dan angkutan udara</p> <p>2.2. Pengembangan penelitian tentang pembangunan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara</p> <p>2.3. Pengembangan penelitian tentang pembangunan sistem transportasi angkutan jalan, asdp, angkutan laut dan angkutan udara</p>				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana perhubungan
3.	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan prasarana umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing KPD	<p>3.1. Pengembangan penelitian tentang pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata</p> <p>3.2. Pengembangan penelitian tentang peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata</p> <p>3.3. Pengembangan penelitian tentang pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung</p>				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan pembangunan fasilitas
4.	Meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan	<p>4.1. Pengembangan penelitian tentang pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan</p> <p>4.2. Pengembangan penelitian tentang peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata</p> <p>4.3. Pengembangan penelitian tentang pengembangan regulasi dan insentif untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi masyarakat lokal menurut peraturan perundang-undangan</p> <p>4.4. Pengembangan penelitian tentang penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan</p>				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		<p>4.5. Pengembangan penelitian tentang perluasan akses pasar terhadap produk dan ikm di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala umkm</p> <p>4.6. Pengembangan penelitian tentang perluasan akses pasar terhadap produk dan ikm di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala umkm</p> <p>4.7. Pengembangan penelitian tentang peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan ikm di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM</p> <p>4.8. Pengembangan penelitian tentang peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat</p>				
5.	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata	<p>5.1. Pengembangan penelitian tentang insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundangundangan</p> <p>5.2. Pengembangan penelitian tentang kemudahan investasi di bidang pariwisata</p> <p>5.3. Pengembangan penelitian tentang promosi investasi di bidang pariwisata</p>				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan bidang investasi

Arah kebijakan 2: Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk	1.1. Pengembangan penelitian tentang segmen pasar wisatawan massal (mass market) dan pengembangan segmen ceruk pasar (niche market) dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
2.	Meningkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata Kepulauan Riau	2.1. Pengembangan penelitian pengembangan dan pemantapan citra pariwisata Kepulauan Riau secara berkelanjutan 2.2. Pengembangan penelitian pengembangan citra kepariwisataan Kepulauan Riau sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
3.	Meningkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata Kepulauan Riau	3.1. Pengembangan penelitian keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan (stakeholders) pariwisata daerah 3.2. Pengembangan penelitian strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab (responsible marketing), yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
4.	Meningkatkan penelitian dalam rangka peran promosi pariwisata Kepulauan Riau di luar negeri	4.1. Pengembangan penelitian tentang promosi pariwisata Kepulauan Riau di luar negeri				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan

Arah kebijakan 3: Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Industri Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan industri pariwisata	1.1. Pengembangan penelitian tentang fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
2.	Meningkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk wisata	2.1. Pengembangan penelitian tentang daya saing daya tarik wisata 2.2. Pengembangan penelitian tentang daya saing fasilitas pariwisata 2.3. Pengembangan penelitian tentang daya saing aksesibilitas				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
3.	Meningkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan usaha pariwisata	3.1. Pengembangan penelitian tentang pengembangan skema kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
4.	Meningkatkan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis	4.1. Pengembangan penelitian tentang manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
5.	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembanggan tanggung jawab terhadap lingkungan	5.1. Pengembangan penelitian tentang manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berwawasan lingkungan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan

Arah kebijakan 4: Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan dan SDM Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan	1.1. Pengembangan penelitian tentang reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan daerah 1.2. Pengembangan penelitian tentang memantapkan peran pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan daerah 1.3. Pengembangan penelitian tentang mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata 1.4. Pengembangan penelitian tentang mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
2.	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan SDM Pariwisata	2.1. Pengembangan penelitian tentang pengembangan SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah 2.2. Pengembangan penelitian tentang pengembangan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan

Di Tetapkan di Tanjungpinang

Pada Tanggal

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MUHAMMAD SANI

